

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Ali, Mohammad, *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi*, Jakarta: Grasindo, 2009
- Anggara, Sahya dan Ii Sumantri, *Administrasi Pembangunan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Bawole, Paulus, *Meningkatkan Kapabilitas Masyarakat Melalui Proses Pembangunan Infrastruktur Kampung Kota Di Yogyakarta*, Media Matrasain 16, no. 1, 2019
- Budiyanti, Eka, *Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019
- Hariyadi, *Prinsip Dasar Pembangunan Infrastruktur: Prespektif Ekonomi Politik dan Pengarusutamaan Lingkungan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019
- Kartono, Drajat Trim dan Hanif Nurcholis, *Konsep dan Teori Pembangunan*
Martin Roestamy & Rekan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bogor: Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum FH-UNIDA, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Meilala, A Qirom Samsudin, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Pengembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Moeliono, Anton M, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

NN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Karawaci: Universitas Pelita Harapan

Rondonuwu, Patrice Mantiri, *Hukum Pemerintah Daerah dan Investasi*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Rondonuwu, Patrice Mantiri, *Soekarno dan Kebijakan Hukum di Indonesia: Dari Proklamasi ke Negara Kesatuan* Jakarta: www.nomadnesia.com, 2017

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988

Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Pusat

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Perusahaan Jalan Tol

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Daerah

Pergub DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2007 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Cikarang – Tanjung Priok Yang Terletak di Kelurahan Marunda, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pergub DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2013 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Pergub DKI Jakarta Nomor 1905 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Pergub DKI Jakarta Nomor 1730 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.483-Pemum/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep. 1284-Pemum/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.483-Pemum/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep. 449-Pemksm/2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep. 1284-Pemum/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep. 170-Pemksm/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.483-Pemum/2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing

Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.195/DTR/2006 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cikarang – Tanjung Priok yang terletak di Desa Gandasari, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Wanajaya, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Jejalen Jaya, Desa Srimahi, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Desa Muara Bakti, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Desa Samudra Jaya, Desa Pantai Makmur, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya yang terletak pada kabupaten Bekasi seluas ± 197,5 ha, dengan atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Keputusan Bupati Bekasi nomor 591/Kep.183-Bappeda/2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.195/DTR/2006 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cikarang – Tanjung Priok yang terletak di Desa Gandasari, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Wanajaya, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Jejalen Jaya, Desa Srimahi, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Desa Muara Bakti, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Desa Samudra Jaya, Desa Pantai Makmur, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya yang terletak pada kabupaten Bekasi seluas ± 197,5 ha, dengan atas nama Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Keputusan Bupati Bekasi dengan Nomor 591/Kep.292-DISTARKIM/2012 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Bekasi nomor 591/Kep.183-Bappeda/2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.195/DTR/2006 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalan Tol Cikarang – Tanjung Priok yang terletak di Desa Gandasari, Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Desa Wanajaya, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Jejalen Jaya, Desa Srimahi, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Desa Muara Bakti, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Desa Samudra Jaya, Desa Pantai Makmur, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya yang terletak pada

kabupaten Bekasi seluas ± 197,5 ha, dengan atas nama Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum

Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Jurnal

Hakim, Lukman, *Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan*, Jurnal Konstitusi 4 No. 1, 2011

Widayanti, Enik, *Pengaruh Infrastruktur terhadap Produktivitas Ekonomi Di Pulau Jawa Periode 2000-2008*, Media Ekonomi Vol. 18 No. 1 April, 2010

Hasil Penelitian

Grigg, N. Dan Fontane, D. G., *Infrastructure System Management & Optimazation*, Internasional Civil Engineering Departement: Diponegoro University, 2000

Internet

Databoks, 2019, *Berapa Jumlah Penduduk di Pulau Jawa pada 2019?*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/berapa-jumlah-penduduk-di-pulau-jawa-2019>, diakses pada 20 Februari 2020

DetikFinance, 2014, *Negara dengan Penduduk Terbanyak Dunia, RI Masuk 4 Besar*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2517461/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar>, diakses pada 26 November 2020

Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Kekayaan Negara, *Mengenal Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Publik Private Partnership (PPP) di Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/artikel/mengenal-kpbu-skema-ppp-di-Indonesia>, diakses pada 20 Februari 2020

Pramesti, Tri Jata Ayu, *Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52bdf2508616/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>, diakses pada 3 Oktober 2020

Pu.go.id, *Nilai Investasi Rp 2,24 Triliun MTD Expressway Bangun Tol Cibitung-Cilincing*, <https://pu.go.id/guntingan/view/3139/nilai-investasi-rp-2-24-triliunmtd-expressway-bangun-tol-cibitung--cilincing>, diakses pada 29 November 2020

Pu.go.id, *PPJT Ruas Cibitung-Cilincing Ditandatangani*, <https://www.pu.go.id/berita/view/4110/ppjt-ruas-cibitung-cilincing-ditandatangani>, diakses pada 29 November 2020

Suaratangerang, *Ini Dia Keuntungan Skema KPB dalam Penyediaan Infrastruktur*, <https://www.suaratangerang.com/2017/08/19/ini-dia-keuntungan-skema-kpbu-dalam-penyediaan-infrastruktur/.html>, diakses pada 7 November 2020

